



RKT RENCANA KERJA TAHUNAN



TAHUN 2025



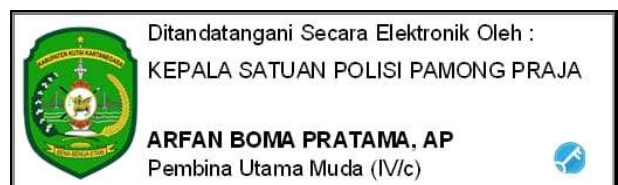
KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik. Untuk tujuan ini, RKT menjadi suatu hal yang cukup kritikal yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. RKT juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan Rencana Strategik (Renstra) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKT didasarkan kepada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, RKT memerlukan pemikiran yang keras untuk menyelaraskan berbagai hal yang telah dituangkan dalam Renstra dan kemungkinan pelaksanaannya. RKT yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program di keseluruhan organisasi dan perencanaan kegiatan di tingkat unit pelaksana. RKT juga harus terintegrasi dengan rencana tindak maupun perencanaan operasional yang lebih rinci sehingga segala sesuatu yang telah disusun dan direncanakan pencapaian sasaran kinerjanya dapat secara jelas dan realistis dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai yang telah diprogramkan dan menjadi instrumen evaluasi pengukuran kinerja. Namun demikian, RKT juga bukan merupakan dokumen yang “kebal” revisi, mengingat terkadang dalam prakteknya, suatu perencanaan dapat berubah sesuai dinamika berbagai hal yang berkembang pada saat itu, utamanya yang terkait dengan permasalahan kesejahteraan rakyat.

Syukur Atas berkah Tuhan Yang Maha Esa bahwa dokumen Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 telah dapat diselesaikan sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Akhirnya, kepada semua pihak, baik dari komponen-komponen yang ada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja maupun unit-unit kerja lain yang telah terlibat dan memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan banyak terima kasih.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

BAB I	Pendahuluan	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	2
	1.3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja	3
BAB II	Rencana Strategis	5
	2.1. Rencana Strategis	5
	2.2. Tujuan Dan Sasaran	7
	2.3. Rencana Kinerja	10
	Tabel Rencana Kerja	10
BAB III	Penutup	11

praja wibawa

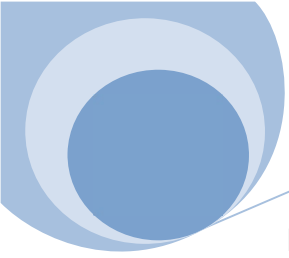
Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2025 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2021-2026. Oleh karena itu, RKT 2025 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Satuan Polisi Pamong Praja. Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam RKT, sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Di samping sebagai penjabaran RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026, agar didapat rencana yang tanggap terhadap perubahan maka RKT 2025 juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir pada tahun 2022 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2025. Selanjutnya dirumuskan rencana aksi sebagai pelaksanaan pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 serta sasaran prioritas Satuan Polisi Pamong Praja.



Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

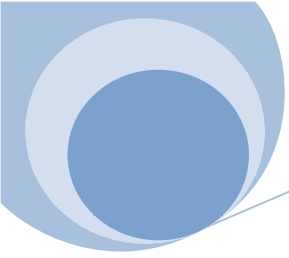
Sesuai Peraturan Bupati No. 71 Tahun 2016, Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Produk Hukum Daerah) dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SATPOL PP menyelenggarakan tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dan fungsi :

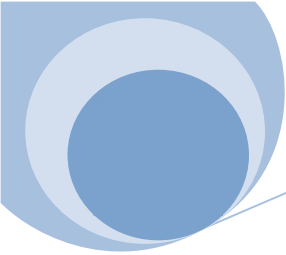
1. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
4. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan



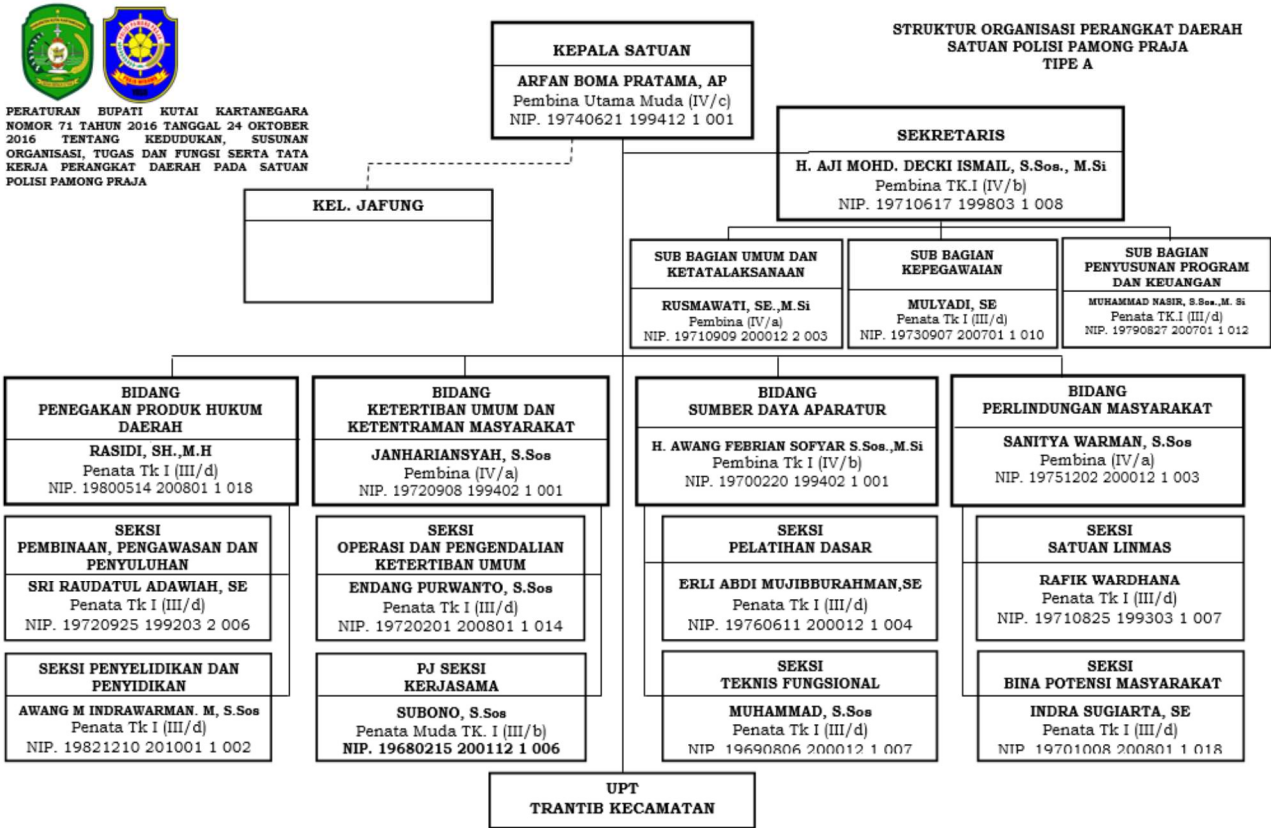
5. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, membawahkan:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Seksi Satuan Linmas, dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar Struktur SATPOL Tahun 2025





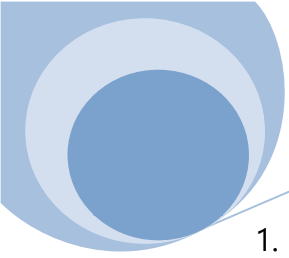
2.1. Rencana Strategis

Guna memudahkan pemahaman atas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta mengetahui keterkaitan antara RKT Satuan Polisi Pamong Praja 2025 dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, berikut diuraikan secara ringkas Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu ***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berbahagia.***

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

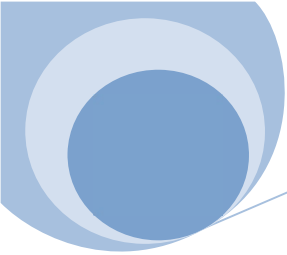


1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya Visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Misi pertama adalah, *"1.Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani "*, dengan Tujuan *Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, dan sasaran Optimalnya kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesiap-siagaan penanggulangan bencana.* Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, dalam hal ini, pemangku tujuan tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

2.2. Tujuan Dan Sasaran

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah/keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat, yang mengemban :

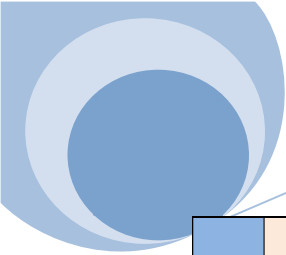


Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Utama						
				Pada Tahun Ke -						
				2021	2022	2024	2024	2025	2026	
2	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.			tingkat kepatuhan terhadap produk hukum daerah	n.a	12%	22%	33%	46%	62%
				Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah	1300	1200	1100	1000	900

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Stategis, maka strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah.	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah	1. Mengoptimalkan pelaksanaan penegakan perda dan perkara	1. Melaksanakan sosialisasi,penyuluhan dan pengawasan Perda dan Perkada
				2. Melaksanakan penegakan perda melalui proses penyidikan dan penyelidikan



				dengan memberdayakan PPNS
				3. Menyelenggarakan sidang tipiring (tindak pidana ringan) secara berkala
			2. Mengoptimalkan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4. Memperkuat penyelenggaraan patroli , Deteksi Dini dan Cegah Dini, terhadap gangguan trantibum.
				5. Melaksanakan diklat mengenai penegakan perda secara berkala

2.3. Rencana Kinerja

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai kartanegara. Didalam rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang sasaran strategi, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai Tahun 2025.

Tabel Rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

**INDIKATOR DAN TARGET PROGRAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan : Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)	NAMA	NIP
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					
	Indikator Kinerja Utama		Uraian indikator kinerja					Kepala Satuan	Arfan Boma Pratama, AP	19740621 199412 1 001
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	64	Persen					
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	Persen					
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	Nilai			Kepala Satuan	Arfan Boma Pratama, AP	19740621 199412 1 001
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen	450,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 012
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	Laporan	50,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 012
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	150,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 013
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	50,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 014
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Satpol PP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	25	Data	250,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 015
1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Berita Acara	50,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 016
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1572	Orang/Bulan	15,849,179,441	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 012
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	25,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 012
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	100,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 012
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	30,000,000	APBD	Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Muhammad Nasir, S.Sos.,M.Si	19790827 200701 1 013
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)	NAMA	NIP
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Satpol PP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5	Paket	2,430,000,000	APBD	Sub Bagian Kepegawaian	Mulyadi, SE	19730907 200701 1 010
1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10	Dokumen	19,580,000	APBD	Sub Bagian Kepegawaian	Mulyadi, SE	19730907 200701 1 011
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Satpol PP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	Orang	20,000,000	APBD	Sub Bagian Kepegawaian	Mulyadi, SE	19730907 200701 1 012
1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	23,710,066	APBD	Sub Bagian Kepegawaian	Mulyadi, SE	19730907 200701 1 010
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	25,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	50,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	30,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)	NAMA	NIP
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	250,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	Paket	600,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	45,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400	Laporan	630,046,500	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	Laporan	10,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	141,582,071	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	50,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	6,966,972,192	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Sekretaris	H. Aji Mohd. Decki Ismail ,S.Sos. ,M.Si	19710617 199803 1 008
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	81	Unit	1,600,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Satpol PP	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	20,000,000	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	78,053,999	APBD	Sub Bagian Umum dan Tatalaksana	Rusmawati, SE.,M.Si	19710909 200012 2 003

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)	NAMA	NIP
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	64	Persen					
			Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan)	100%	Persen			Kabid. Trantibum	Janhariansyah, S.Sos	19720908 199402 1 001
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12	Laporan	1,628,240,000	APBD	Kepala Seksi Ops. dan Pengendalian Ketertiban Masyarakat Umum	Endang Purwanto, S.Sos	19720201 200801 1 014
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	100	Laporan	50,000,000	APBD	Kepala Seksi Ops. dan Pengendalian Ketertiban Masyarakat Umum	Endang Purwanto, S.Sos	19720201 200801 1 014
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4	Dokumen	100,000,000	APBD	Kepala Seksi Kerjasama	Subono, S.Sos	19680215 200112 1 006
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3	Dokumen	800,000,000	APBD	Kepala Seksi Satuan Linmas	Rafik Wardhana	19710825 199303 1 007
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	159	Orang	2,700,000,000	APBD	Kepala Seksi Pelatihan Dasar	Erlil Abdi Mujibburahman, SE.,MM	19760611 200012 1 004
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5	Dokumen	100,000,000	APBD	Kepala Seksi Kerjasama	Subono, S.Sos	19680215 200112 1 006
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12	Laporan	10,000,000	APBD	Kepala Seksi Ops. dan Pengendalian Ketertiban Masyarakat Umum	Endang Purwanto, S.Sos	19720201 200801 1 014
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	24	Unit	10,000,000		Kepala Seksi Ops. dan Pengendalian Ketertiban Masyarakat Umum	Endang Purwanto, S.Sos	19720201 200801 1 015

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA			PAGU INDIKATIF	SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB (PENGAMPU)	NAMA	NIP
			PROGRAM/KELUARAN KEGIATAN (OUTPUT)							
			Tolak Ukur/Indikator	Target	Satuan					
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	240	Laporan	1,950,000,000	APBD	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Awang M. Indrawarman M, S.Sos	19821210 201001 1 002
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan	150,000,000	APBD	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	Awang M. Indrawarman M, S.Sos	19821210 201001 1 002
JUMLAH						37,492,364,269				

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab dan amanah untuk memelihara dan menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Produk Hukum Daerah dan Perlindungan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja berlandaskan kepada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun Rencana Strategis.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini merupakan suatu perangkat kerja organisasi dalam proses pelaksanaan pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan, yang merupakan penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026.

Selanjutnya, seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya senantiasa menjadikan Rencana Kerja Tahun 2025 ini sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggarannya sehingga target-target sasaran yang ditetapkan dapat terwujud.

